

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Timbulnya praktek manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) dalam Pujiningsih (2011), konsep teori agensi adalah: ...hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen.

Sedangkan Hendriksen dan Michael (2000) dalam Permanasari (2010), menyatakan bahwa:

“Teori keagenan adalah kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal dan prinsipal menutup kontrak untuk memberi imbalan kepada agen. Analoginya seperti antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan”.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Panggabean (2011), menjelaskan hubungan keagenan:

“Sebuah kontrak antara manajer (agen) dengan investor (principal). Pemilik mengharapkan *return* yang tinggi dari investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan. Sedangkan manajemen mengharapkan kompensasi yang tinggi dan dipenuhinya kebutuhan psikologis mereka. Hal ini menyebabkan timbul konflik antara manajemen dengan pemilik karena masing-masing akan

memenuhi kepentingannya sendiri (*opportunistic behavioral*). Pemilik akan mengeluarkan biaya monitoring untuk mengawasi kinerja manajemen. Manajemen akan berusaha meminimalkan biaya keagenan (*agency cost*) dengan sukarela memberi informasi keuangan kepada pemilik. Manajemen memberikan laporan keuangan secara teratur dengan harapan dapat mengurangi biaya *monitoring*".

Tendi Haruman (2008) dalam Permanasari (2010), menjelaskan bahwa:

"Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga timbul biaya keagenan (*agency cost*). Ada beberapa alternatif untuk mengurangi *agency cost*, diantaranya adanya kepemilikan saham oleh institusional dan kepemilikan saham oleh manajemen".

Bentuk lain dari masalah keagenan adalah konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Masalah ini berpotensi muncul pada perusahaan yang struktur kepemilikannya relatif terkonsentrasi (*closely held*). Dalam kondisi seperti ini, *controlling shareholders* mempunyai kendali terhadap manajemen, sehingga keputusan-keputusan yang diambil cenderung mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Eisenhardt dalam Panggabean (2011), menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Nugraha (2010), memaparkan bahwa biaya keagenan yang dibutuhkan untuk menyelaraskan antara kepentingan agen dengan pemilik perusahaan. Biaya ini merupakan jumlah dari:

1. Pengeluaran biaya oleh *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap agen.
2. Pengeluaran karena penggunaan hutang oleh agen.
3. Pengeluaran karena kehilangan kebebasan (*residual loss*).

Manajer sebagai pengelola perusahaan merupakan orang yang lebih banyak mengetahui mengenai informasi internal dan prospek dari suatu perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan si pemilik. Oleh karena itu, manajemen berkewajiban untuk memberikan sinyal kepada pemilik perusahaan mengenai kondisi perusahaan. Sinyal itu dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Ketidakseimbangan penguasaan informasi, akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetris informasi (*information asymmetry*). Dengan adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba sehingga akan menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Teori keagenan modern mencoba untuk menjelaskan struktur modal perusahaan sebagai cara untuk meminimalisasi biaya yang dikaitkan dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Perusahaan yang dikuasai oleh manajerial, maka biaya keagenannya rendah. Hal ini disebabkan antara pemegang saham dan manajer terdapat tujuan yang sama.

2.1.2 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari para pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer. Istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting didalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang dan *equity* tetapi juga oleh presentase kepemilikan oleh manajer dan institusional. Pada perusahaan modern, kepemilikan perusahaan biasanya sangat menyebar.

Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. *Agencyproblem* dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal, 2005). Jensen dan Meckling (1976) dalam Faisal (2005) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan.

Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faisal, 2005), sedangkan pemegang saham institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau diatas 5%. Pemegang saham institusional besar

diasumsikan memiliki orientasi investasi jangka panjang. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Faisal, 2005).

Wahyudi dan Pawestri (2006) yang menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan keputusan keuangan sebagai variabel *intervening* menemukan bahwa struktur kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

2.1.2.1 Kepemilikan Manajerial

2.1.2.1.1 Definisi Kepemilikan Manajerial

Halim (2007: 1-2) menjelaskan mengenai kepemilikan di dalam perusahaan sebagai berikut:

“Kepemilikan di dalam perusahaan dibuktikan dengan lembar saham biasa. Setiap lembar saham menyatakan pemiliknya memiliki $1/n$ dari saham perusahaan, dimana “n” menunjukkan jumlah lembar saham yang dikeluarkan. Untuk tujuan manajemen keuangan, kekayaan pemegang saham dinyatakan dengan harga pasar per lembar saham dari perusahaan yang bersangkutan”.

Wulandari (2011: 26) kepemilikan saham manajerial adalah: ... kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi *agency problem* diantara manajer dan pemegang saham, yang dapat dicapai melalui penyelarasan kepentingan diantara pihak-pihak yang berbenturan kepentingan. Disisi yang lain, manajer yang memiliki

saham perusahaan dalam porsi yang besar memiliki lebih banyak insentif untuk mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan semua pemegang saham.

Jensen dan Meckling dalam Kawatu (2009:408), menjelaskan kepemilikan manajerial, sebagai berikut:

“kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga. Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah”.

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Agustiani (2013), pengertian kepemilikan manajerial adalah: ...para manager saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Diyah dan Erman (2009) pengertian kepemilikan manajemen adalah: ...persentase kepemilikan saham oleh direksi, manajemen, komisaris maupun setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan.

Dari definisi kepemilikan manajerial di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki manajer yang dinyatakan dalam persen (%) sehingga manajer sekaligus bertindak sebagai pemegang saham.

2.1.2.1.2 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Pengukuran kepemilikan manajerial menurut Jensen dan Meckling dalam Kawatu (2009:408),, yaitu:

$$\frac{\Sigma \text{saham yang dimiliki manajer dan dewan komisaris}}{\Sigma \text{seluruh saham perusahaan}} \times 100\%$$

Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. Laba yang kurang berkualitas bisa terjadi karena dalam menjalankan bisnis perusahaan, manajemen bukan merupakan pemilik perusahaan. Pemisahan kepemilikan ini akandapat menimbulkan konflik dalam pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan para pemilik. Konflik yang terjadi akibat pemisahan kepemilikan ini disebut dengan konflik keagenan.

2.1.2.2 Kepemilikan Institusional

2.1.2.2.1 Definisi Kepemilikan Institusional

Sutojo dan Aldridge (2005: 212) menjelaskan mengenai investor institusional atau kepemilikan institusional sebagai berikut:

“Investor institusional perusahaan publik antara lain terdiri dari danapensiun, perusahaan asuransi, perusahaan dana reksa, mutual trust, unit trust dan *investment fund* yang dibentuk perusahaan-perusahaan asuransi. Di beberapa Negara lain seperti Jerman, Jepang dan Inggris di mana bank diperbolehkan bergerak dalam perdagangan surat berharga termasuk saham, bank juga termasuk dalam daftar investor institusional”.

Sutojo dan Alridge (2005: 217) menjelaskan mengenai peranan investor institusional antara lain sebagai berikut:

- 1) “Mengarahkan dan memonitor arah kegiatan bisnis perusahaan (*directing and control*).
- 2) Sumber informasi perusahaan (*source of company’s information*).
- 3) Pengajuan suara dalam rapat pemegang saham (*voting*)”.

Jensen dan Meckling dalam Kawatu (2009:408), menjelaskan kepemilikan institusional sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor non institusional. Investor institusional diyakini mampu memonitor tindakan manajer dengan lebih baik dibanding dengan investor individual”.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Permanasari (2010), menyatakan bahwa:

“Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba”.

Dari definisi kepemilikan institusional di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5 %)

mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan.

2.1.2.2.2 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Pengukuran kepemilikan institusional menurut Jensen dan Meckling dalam Kawatu (2009:408), yaitu:

$$\frac{\Sigma \text{saham institusional perusahaan}}{\Sigma \text{seluruh saham perusahaan}} \times 100\%$$

Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya, maka tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. Menurut Permanasari (2010), kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

2.1.3 Corporate Governance

Dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-117/M-MBU/2002 juga diperoleh definisi mengenai *corporate governance*. Dalam surat keputusan tersebut, *corporate governance* didefinisikan sebagai:

“suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.”

Corporate Governance merupakan seperangkat proses, adat, kebijakan, hukum, dan institusi yang mempengaruhi bagaimana sebuah perusahaan diarahkan, diadministrasikan, dan dikendalikan. *Corporate Governance* juga berisi hubungan antara banyak pemain yang terlibat (*thestakeholders*) dan tujuan untuk apa perusahaan diatur. Pemain utamanya adalah pemegang saham, manajemen, dan *board of directors*. *Stakeholders* lain yang juga terlibat, adalah karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan pemberi pinjaman lainnya, pemerintah, lingkungan dan komunitas luas.

Price Waterhouse Coopers dalam Surya Yustiavandana (2006:26) mendefinisikan bahwa *corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif, dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelolarisiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menguraikan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan perusahaan, disamping juga menjelaskan perusahaan untuk menentukan arah dan kinerja perusahaan (Mietha dan Tuzahro, 2009). Beberapa praktik *corporate*

governance antara lain dapat diwujudkan dengan adanya proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan auditor independen yang diproksi dengan ukuran KAP.

Penerapan *Corporate Governance* diakui memberikan manfaat bagi negara, stakeholders, maupun bagi perusahaan yang menerapkannya. Efek positif dari penerapan *good corporate governance* pada stakeholders yang berbeda sekaligus adalah menguatkan perekonomian, dan juga *good corporate governance* merupakan sebuah alat untuk pengembangan lingkungan sosial dan ekonomi. Bagi negara di mana mayoritas perusahaannya telah menerapkan *good corporate governance*, maka pasar modal di Negara tersebut akan cenderung lebih diminati oleh investor global.

Menurut *The Forum for Corporate Governance in Indonesia*, kegunaan dari *corporate governance* yang baik adalah :

1. Lebih mudah memperoleh modal dan biaya modal (*cost of capital*) pun lebih rendah. Pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan menurunnya tingkat resiko perusahaan.
2. Memperbaiki kinerja usaha.
3. Mempengaruhi harga saham.
4. Memperbaiki kinerja ekonomi.

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan *corporate governance* adalah suatu kebijakan dalam perusahaan yang mengelola, mengatur, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders.

Dalam *Corporate governance* terdapat beberapa prinsip yang perlu mendapat perhatian dari perusahaan untuk eksis di pasar yang bersaing, berdaya inovatif yang

tinggi, mampu mengambil risiko yang wajar dan senantiasa mengembangkan strategi yang baru untuk mengantisipasi situasi yang terus berubah dari waktu ke waktu. Untuk itu, setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan Pedoman Umum *GoodCorporate Governance* Indonesia tahun 2006 adalah :

1. Transparansi (*Transparancy*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Kelima prinsip di atas harus dilaksanakan secara bersama-sama agar tercipta suatu kondisi tata kelola perusahaan yang baik. Setiawan (2007) menjelaskan manfaat dari *corporate governance* adalah entitas bisnis efisien, meningkatkan kepercayaan publik, menjaga *going concern* perusahaan, mengukur kinerja target manajemen, meningkatkan produktivitas, mengurangi *distorsi*. Manfaat lain dari *corporate governance* adalah meningkatkan modal, rendahnya biaya modal, meningkatkan kinerja bisnis dan ekonomi serta memberikan pengaruh positif terhadap saham (FCGI publication, 2006).

2.1.3.1 Struktur *Corporate Governance*

Perwujudan *good corporate governance*, dimulai dengan struktur *governance*. Berasal dari kata *gubernare*, *governance* berarti mengendalikan, memberi arahan, layaknya seorang nakhoda kapal. Dengan kata lain siapapun yang menjadi pelaku dalam struktur *governance*, adalah seorang atau badan yang mampu memberikan arahan dan mengendalikan perusahaan agar tetap dikelola berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2006).

Syakhroza (2003) menyatakan bahwa struktur *governance* adalah suatu kerangka di dalam organisasi mengenai bagaimana prinsip *governance* bias dibagi, dijalankan, serta dikendalikan. Struktur *governance* didesain sedemikian rupa agar mampu mendukung berjalannya aktivitas organisasi perusahaan secara bertanggung jawab dan terkendali. Dengan kata lain struktur *governance* harus mampu mendukung tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

2.1.3.2 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Menurut Iskander & Chamlou (2000) dalam Lastanti (2004), mekanisme dalam pengawasan *corporate*

governance dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan external *mechanisms*. Internal *mechanisms* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*, sedangkan *external mechanisms* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar.

Ada beberapa mekanisme *corporate governance* yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba, diantaranya adalah konsentrasi kepemilikan, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit. Peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

Komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi (Andri dan Hanung, 2007). Ini membuktikan bahwa mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi adanya praktik manipulasi terhadap laporan

keuangan yang dilakukan oleh manajer. Praktik manipulasi tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba.

2.1.3.3 Komite Audit

2.1.3.3.1 Definisi Komite Audit

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, yaitu:

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”

Menurut Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah: ...komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

James A Hall dialihbahasakan oleh Dewi (2007:16) komite audit adalah: “...pemeriksa dan penyeimbang yang independen untuk fungsi audit internal dan perantara dengan para auditor eksternal”.

Komite audit merupakan salah satu komponen *good corporate governance* yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasipartisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan

keuangan. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. (IKAI, 2004).

Direksi PT Bursa Efek Jakarta dengan suratnya Nomor: kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C mengatur hal-hal mengenai komite audit. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, dan seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite.

Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dimana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan.

Dengan adanya komite audit yang berjalan secara efektif, komisaris dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, komite audit juga membantu komisaris untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi pengendalian internal perusahaan, menyelesaikan masalah-masalah audit, dan memberikan waktu bagi komisaris untuk lebih fokus ke masalah lain.

Dari beberapa definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang membantu dewan komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektifitas internal dan eksternal audit.

2.1.3.3.2 Pengukuran Komite Audit

James A Hall dialihbahasakan oleh Dewi (2007:20) menyatakan bahwa: “Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit diperusahaan”.

Berdasarkan uraian diatas, rumus perhitungan komite audit adalah sebagai berikut:

$$KA = \Sigma \text{Anggota Komite Audit diperusahaan}$$

Menurut Robert Jao (2011), komite audit diukur dengan menggunakan:

$$\text{Komite Audit} = \Sigma \text{Rapat dalam satu tahun}$$

2.1.3.4 Proporsi Dewan Komisaris Independen

2.1.3.4.1 Definisi Proporsi Dewan Komisaris Independen

Menurut Samsul (2006:72) dewan komisaris independen adalah “...anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota dewan direksi dan pemegang saham kendali.”

Menurut Fakhrudin (2008:102) dewan komisaris adalah “...anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Menurut Widjaja (2009:79) dewan komisaris independen adalah “...anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya.”

Menurut Egon Zehnder (2000) dalam Ningsaptiti (2010), dewan komisaris: “Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas”.

Siallagan (2006) dalam Ningsaptiti (2010), mengatakan bahwa: “Peranan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi *monitoring* atas pelaporan keuangan”.

Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi tingkat efektivitas dewan komisaris yaitu independensi, kompetensi, dan komitmen. Praktek *corporate governance* mengharuskan adanya komisaris independen dalam perusahaan yang diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif dan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders*lainnya. Menurut peraturan pencatatan No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimal 30% dari keseluruhan dewan komisaris. (Agustiani, 2013).

Tugas dewan komisaris adalah mengawasi sekaligus memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan, sedangkan direksi sendiri bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun yang perlu diperhatikan adalah mengenai independensi dewan komisaris. Independensi yang dimaksud adalah anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan manajemen maupun dengan perusahaan melalui transaksi-transaksi yang jumlahnya signifikan, hubungan keluarga, dan hubungan-hubungan lainnya yang dapat menyebabkan komisaris independen tidak dapat berpikir secara objektif.

Berdasarkan beberapa definisi dewan komisaris di atas menunjukkan bahwa dewan komisaris adalah bagian organ perseroan (seluruh anggota dewan komisaris)

yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*.

2.1.3.4.2 Pengukuran Proporsi Dewan Komisaris

Menurut Widjaja (2009:82) pengukuran dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota anggaran dewan komisaris.”

Berdasarkan uraian diatas, rumus perhitungan dewan komisaris independen sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Menurut Robert Jao (2011), komposisi dewan komisaris independen diukur sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Σ anggota komisaris luar perusahaan}}{\text{Seluruh komisaris perusahaan}} \times 100\%$$

2.1.3.5 Ukuran KAP

2.1.3.5.1 Definisi Ukuran KAP

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya”.

Sedangkan Akuntan Publik itu sendiri berarti:

“Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini”.

Menurut Cameran (2005) dalam Eli Suhayati (2012) menyatakan, bahwa Reputasi KAP sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan, ketika kantor akuntan yang bereputasi baik diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Menurut Eli Suhayati (2012) auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik besar dipandang sebagai auditor yang bereputasi tinggi. KAP yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan) dibandingkan dengan KAP yang reputasinya kurang baik.

Hasil audit tidak bisa diamati secara langsung sehingga pengukuran variabel kualitas audit maupun kualitas auditor menjadi sulit untuk dioperasionalkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, para peneliti terdahulu kemudian mencari indikator pengganti dari kualitas auditor. Dimensi kualitas auditor yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran kantor akuntan publik atau KAP karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap merupakan gambaran yang paling penting (Sanjaya, 2008).

Laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan ke BAPEPAM tentunya membutuhkan jasa kantor akuntan publik (KAP) agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan jasa kantor akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Untuk menjamin kredibilitas laporan keuangan tersebut perusahaan cenderung menggunakan jasa kantor akuntan publik yang baik dan mempunyai reputasi atau nama baik. Kantor akuntan publik yang besar dan mempunyai reputasi baik biasanya ditunjukkan bahwa kantor akuntan publik memiliki kualitas audit yang lebih baik. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan kantor akuntan publik yang besar seperti *the big four* cenderung dipilih oleh investor karena investor menganggap perusahaan dengan KAP besar akan dapat menghasilkan kualitas audit yang baik dari pada KAP kecil (Oktorina dan Suherli, 2005 dalam Ade Putri dan Made Gede, 2013).

2.1.3.5.2 Pengukuran Ukuran KAP

Ada 4 KAP terbesar di Amerika Serikat yang disebut KAP Internasional dengan julukan *The Big Four*. Masing-masing KAP tersebut memiliki kantor di setiap kota besar di Amerika Serikat dan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. *The Big Four* di Indonesia menurut Indah, Adri dan Elfi (2014) diwakili kepentingannya oleh KAP di Indonesia, adalah sebagai berikut

1. KAP *Price Water house Coopers* (PWC), bekerjasama dengan KAP Drs. Hadi Sutanto & Rekan, Haryanto Sahari & Rekan.

2. KAP *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG), bekerjasama dengan KAP Sidharta-Sidharta & Widjaja.
3. KAP *Ernest & Young* (E&Y), bekerjasama dengan KAP Purwantono, Sarwoko, & Sanjadja.
4. KAP Hans Tuanakotta & Mustofa, Osman Ramli Satrio & Rekan.

Untuk variabel ini akan diukur dengan cara, auditor perusahaan yang termasuk KAP *Big Four* diberi nilai 1, sedangkan KAP *Non Big Four* diberi nilai 0.

2.1.4 Manajemen Laba

2.1.4.1 Definisi Manajemen Laba

Ada beberapa definisi yang berbeda dari satu dengan yang lain antara lain: definisi manajemen laba yang diciptakan oleh Schipper (1989), *National Association of Fraud Examiners* (1993), serta Healy dan Wahlen (1999) dalam (Sri Sulistyanto, 2008).

Menurut Schipper (1989) dalam Sri Sulistyanto, (2008,49):

“Earnings management is a purposes intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain a opposed to say, merely facilitating the neutral operation of the process (Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfassilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses)”.

Menurut *National Association of Certified Freud Examiners*(1993) dalam Sri Sulistyanto, (2008, 49):

“Earnings management is the intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or judgement or decision (Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya).

Menurut Healy dan Wahlen (1999) dalam Sri Sulistyanto (2008, 50):

“Earnings management occurs when managers uses judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about underlying economics performance of the company or to influence contractual aoutmes that depend on the reported accounting numbers (Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan stakeholderyang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu.)”

Menurut Scoot (2009:403) dalam Robert Jao (2011), manajemen laba adalah:

.....tindakan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi atau tindakan yang mempengaruhi laba sehingga dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam pelaporan laba.

Menurut Ahmed Riahai dan Belkaoui (2007:201) definisi manajemen laba adalah:

...potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.

Secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin

mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dan mengelabui inilah yang dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan.

2.1.4.2 Motivasi Manajemen Laba

Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan dalam Sri Sulistyanto (2008:63):

1. *Bonus Plus Hypothesis*

Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan.

2. *Debt Covenant Hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperoleh. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumberdaya.

3. *Political Cost Hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan memperlakukan laba agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan.

Scott (2000:302) dalam Rahmawati (2007) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba:

1. *Bonus Purpose*,
Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara opportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.
2. *Political Motivations*
Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan public. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan public yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.
3. *Taxation Motivations*
Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.
4. Pergantian CEO
CEO yang mendeteksi masa pension akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.
5. *Initial Public Offering (IPO)*
Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.
6. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor
Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

2.1.4.3 Pola dan Teknik Manajemen Laba

Scott (2000) dalam Rahmawati (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa pola dalam manajemen laba, yaitu:

- a. *Taking a Bath*
Pola ini terjadi pada saat pengangkatan *CEO* baru dengan cara melaporkan kerugian dalam jumlah besar yang diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.

b. *Income Minimization*

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada masa mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

c. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

d. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Pola manajemen laba dalam Sri Sulistyanto (2008:177), antara lain: menaikkan laba (*income increasing*), penurunan laba (*income decreasing*), dan perataan laba (*income smoothing*).

Pola menaikkan laba (*income increasing*), merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.

Pola penurunan laba (*income decreasing*), merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.

Sedangkan pola perataan laba (*income smoothing*), merupakan upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini

dilakukan dengan memperlakukan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.

Teknik manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi
 Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.
2. Mengubah metoda akuntansi
 Perubahan metoda akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh : merubah metoda depresiasi aktiva tetap, dari metoda depresiasi angka tahun ke metoda depresiasi garis lurus.
3. Menggeser perioda biaya atau pendapatan.
 Contoh rekayasa perioda biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada perioda akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

2.1.4.4 Metode Manajemen Laba

Beneish (2001) yang dikutip oleh Restuwulan (2013), menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mendeteksi adanya praktek manajemen laba:

1. Pendekatan yang mengkaji akrual agregat dan menggunakan metode regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan dan yang tidak diharapkan.
2. Pendekatan yang menekankan pada akrual spesifik seperti cadangan utang ragu-ragu atau akrual pada sektor spesifik seperti tuntutan kerugian pada industri asuransi.

3. Pendekatan yang mengkaji ketidaksinambungan dalam pendistribusian pendapatan.

Dari ketiga pendekatan di atas, pendekatan yang pertama yang lebih banyak digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya manajemen laba dengan menghitung total akrual. Penelitian yang berkaitan dengan metode deteksi *earning management* antara lain dilakukan oleh Dechow, et al (1995) yang mengevaluasi berbagai alternatif model untuk mendeteksi *earning management* berdasarkan *accruals*. Perbandingan dilakukan terhadap lima model yaitu, model Healy, model De Angelo, model Jones, model Modified Jones dan model Industri. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kemampuan model dengan menerapkan pengujian statistik.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:216), model empiris bertujuan untuk mendeteksi manajemen laba, pertama kali dikembangkan oleh Healy, De Angelo, model Jones serta model Jones dengan modifikasi. Adapun penjelasan mengenai model tersebut antara lain:

1. Model Healy

Model empiris untuk mendeteksi manajemen pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985.

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flows\ From\ Operations$$

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.
$$NDA_t = \frac{TAC}{T}$$

Keterangan : NDA = *Nondiscretionary accruals*

TAC = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode_{t-1}

T = 1, 2,T merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi

t = Tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accrual* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

2. Model De Angelo

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh De Angelo pada tahun 1986.

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flows\ From\ Operations$$

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Keterangan : NDA_t = Discretionary accruals yang diestimasi

TAC_t = Total akrual periode t

TA_{t-1} = Total akrual periode $t-1$

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accrual* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

3. Model Jones

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991), ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan.

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flows\ From\ Operations$$

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linier sederhana.

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = b_0 \frac{1}{TA_{t-1}} + b_1 \frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} + b_2 \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} +$$

Keterangan : TA_{t-1} = Total akrual periode $t-1$

$$\begin{aligned} \text{Sales}_{i,t} &= \text{Perubahan penjualan} \\ \text{PPE}_{i,t} &= \text{Aktiva tetap (gross property plant and} \\ &\text{equipment)} \end{aligned}$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen, yaitu $b_1 = 4936,211$, $b_2 = 0,000$ dan $b_3 = 7,985$ yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondiscretionary total accruals*.

$$NDA_{i,t} = b_0 \frac{1}{TA_{i,t-1}} + b_1 \frac{\Delta \text{Sales}_{i,t} - \Delta \text{TR}_{i,t}}{TA_{i,t-1}} + b_2 \frac{\text{PPE}_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$$

Keterangan : $\text{Sales}_{i,t}$ = Perubahan penjualan

$\text{TR}_{i,t}$ = Perubahan piutang dagang

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accrual* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

4. Model Jones Modifikasi

Model Jones dimodifikasi merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan.

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flows\ From\ Operations$$

Langkah II: Menghitung nilai *accruals* yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*)

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = b_0 \frac{1}{TA_{t-1}} + b_1 \frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} + b_2 \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} +$$

Keterangan : TA_{t-1} = Total akrual periode $t-1$

$Sales_{i,t}$ = Perubahan penjualan

$PPE_{i,t}$ = Aktiva tetap (*gross property plant and equipment*)

Langkah III: Menghitung nilai *nondiscretionry total accrual* (NDTA) dihitung sebagai berikut:

$$NDTA_{i,t} = b_0 \frac{1}{TA_{i,t-1}} + b_1 \frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} + b_2 \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$$

Keterangan : $TR_{i,t}$ = Perubahan piutang dagang

Langkah IV: Menghitung nilai *discretionary accruals* (DTA) merupakan selisih total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary total accruals* (NDTA).

$$DTA = TAC - NDTA$$

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam mencatat dan menyusun laporan keuangannya. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*), sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola penaikan laba (*income increasing*) dan nilai

negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*).

Menurut Friedlan Arifa (2002) dalam Muid (2005), untuk mendeteksi apakah perusahaan melakukan manajemen laba dalam laporan keuangannya digunakan rumus *total accruals*. Menerjemahkannya ke dalam persamaan:

$$TAC_{pt} = NOI_{pt} - CFFOpt$$

Keterangan : TAC_{pt} = Total *accrual* pada periode tes

NOI_{pt} = *net operating income* pada periode tes

$CFFOpt$ = *cash flow from operating* pada periode tes

Menurut Healy dan De Angelo (Scott 1997) dalam Arifa (2002) dalam Muid (2005), *total accrual* terdiri dan *discretionary* dan *non-discretionary accruals*. *Total accruals* digunakan sebagai indikator, sebab *discretionary accrual* (DAC) sulit untuk diamati, karena ditentukan oleh kebijakan masing-masing manajer. Friedlan Arifa (2002) dalam Muid (2005), merumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$DAC_{pt} = (TA_{pt} / Sales_{pt}) - (TAC_{pd} / Sales_{pd})$$

Keterangan : DAC_{pt} = *disrectionary accrual* periode tes

TA_{pt} = total *accruals* pada periode tes

$SALES_{pt}$ = penjualan pada periode tes

TA_{pd} = total *accruals* pada periode dasar

$SALES_{pd}$ = penjualan pada periode dasar

Adanya manajemen laba dinilai dengan DAC positif dan apabila DAC bernilai negatif berarti tidak terdapat manajemen laba.

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur yang terlibat dalam formula tersebut, antara lain:

1. Total Akrua

Pengertian Accrual menurut Agus Sartono (2010):

“*Accruals* adalah kewajiban jangka pendek yang terjadi berulang terus-menerus. Sebagai contoh adalah utang upah, utang pajak, dan bunga terutang.”

Menurut Utami (2006) (Restuwulan, 2013), total akrual adalah: ...Selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu bagian akrual yang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan disebut normal akrual atau *non discretionary accrual* dan bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut dengan abnormal akrual atau *discretionary accrual*.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:164):

“*Nondiscretionary accrual* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum.”

Sedangkan menurut Chan, Jegadesh, dan Lakonoshok (2001) dalam (Restuwulan, 2013) *discretionary accrual* adalah:sebagai indikator

adanya praktik manajemen laba, karena manajemen laba lebih menekankan pada keleluasaan atau kebijakan (*discretion*) yang tersedia dalam memilih dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencapai hasil akhir, dan dijalankan dalam kerangka praktik yang berlaku secara umum yang masih diperdebatkan. Atau dengan kata lain, *discretionary accrual* merupakan *accrual* dimana manajemen memiliki fleksibilitas dalam mengontrol jumlahnya karena discretionary accrual ada di bawah kebijaksanaan (*discretion*) manajemen.

2. Laba

Menurut Soemarso (2004:245) Laba adalah: ...selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu.

Pengertian laba menurut Zaky Baridwan (2010 : 29) adalah: ...kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang termasuk dari pendapatan (revenue) atau investasi oleh pemilik.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2001 : 219) dalam Restuwulan, 2013 mengemukakan jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba, yaitu :

- a. Laba kotor
- b. Laba dari operasi
- c. Laba bersih

Adapun penjelasan jenis – jenis laba diatas sebagai berikut :

1) Laba kotor

Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.

2) Laba dari operasi

Laba dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban biaya.

3) Laba Bersih

Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi oleh beban lain-lain. Setiap perusahaan ataupun jenis usaha lainnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh laba yang besar untuk dapat memperoleh keuntungan.

3. Arus Kas

Dalam PSAK No.2 paragraf 6 (IAI: 2009) dinyatakan bahwa: Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas berisi ikhtisar sumber dan penggunaan kas atau setara kas suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas, investasi dan pendanaan selama periode akuntansi tertentu selama perusahaan melakukan aktivitasnya. Adapun klasifikasi laporan arus kas yaitu:

1) Aktivitas Operasi

Dalam PSAK No. 2 paragraf 13 (IAI : 2009) dinyatakan bahwa jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa.
- b. Penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain.

- c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.
- d. Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan.
- e. Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya.

2) Aktivitas Investasi

Dalam PSAK No. 2 paragraf 16 (IAI : 2009) dinyatakan bahwa pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- a. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri.
- b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain.
- c. Pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain pembayaran kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjanjikan).

- d. Kas yang diterima dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan kas dari instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjanjikan).
- e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan).

3) Aktivitas Pendanaan

Dalam PSAK No. 2 paragraf 17 (IAI : 2009) dinyatakan bahwa pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan penting dilakukan karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

- a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya.
- b. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas.
- c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lainnya.
- d. Pelunasan pinjaman.

- e. Pembayaran kas oleh penyewa (*lessee*) untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (*finance lease*).

4. Sales (Penjualan)

Menurut Soemarso (2004:160) penjualan adalah:transaksi antara perusahaan dengan pembeli untuk menyerahkan barang atau jasa yang berakibat timbulnya piutang, kas aktiva.

Sedangkan menurut Mulyadi (2008:160) penjualan adalah:suatu kegiatan yang terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, secara kredit maupun tunai.

5. Aktiva Tetap

Sri Sulistyanto (2008:197) mengemukakan aktiva tetap merupakan harta perusahaan yang mempunyai wujud fisik, dipakai dalam operasi normal perusahaan, dimiliki perusahaan lebih dari satu periode akuntansi, dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aktiva tetap dapat diklasifikasikan menjadi aktiva tetap yang umurnya terbatas dan aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. Aktiva tetap yang umurnya terbatas adalah aktiva tetap tidak dapat terus menerus digunakan tetapi suatu saat akan rusak atau usang sehingga harus diganti dengan aktiva sejenisnya, misalkan gedung, kendaraan, mesin, dan lain-lain (Sri Sulistyanto, 2008).

6. Piutang

Menurut Sri Sulistyanto (2008:185) piutang merupakan:

“Tagihan perusahaan kepada pihak lain karena perusahaan telah menjual produknya kepada pihak lain secara kredit (nontunai)”.

Menurut Marihot dan Dearlina (2005:36):

“Piutang adalah semua tuntutan terhadap pelanggan, baik berbentuk perkiraan uang, barang maupun jasa, serta segala hal yang berbentuk perkiraan seperti transaksi. Selanjutnya, piutang merupakan kewajiban pelanggan yang disepakati dan mereka mengharapkan pembayaran itu diselesaikan dengan tanda terima yang sah”.

Pengertian piutang, menurut Harry Simons (1972) dalam Marihot dan Dearlian (2005:26), adalah:

“The term receivable is applicable to all claims against other, whether are claims for money, for goods, or for serving, for accounting purpose, however the termsd is employed is a narrower sense to designate claims that claims that are expected to be settled by the receipt of money”.

Menurut Anton M. Samosir (1980) dalam Marihot dan Dearlian (2005:36) mengartikan piutang sebagai: ...unsur modal kerja yang selalu berputar menuurut siklus perusahaan normal.

2.2 Kerangka Pemikiran

Manajemen laba merupakan salah satu bentuk akibat asimetris informasidalam teori agensi. Hal ini dikarenakan manajer lebih mengetahui informasi tentang perusahaan yang dikelolanya. Kehadiran *good corporate governance* diharapkan dapat menciptakan iklim tata kelola yang baik dan lebih transparan. *Good*

corporate governance juga diharapkan dapat mengurangi terjadinya kasus manipulasi terhadap *Earnings Manajemen*.

Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998), mekanisme *corporate governance* meliputi mekanisme internal, seperti adanya struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif, dan mekanisme eksternal, seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan dengan hutang (*debt financing*). Sedangkan menurut Veronica dan Bachtiar (2004), beberapa mekanisme *corporate governance* antara lain diwujudkan dengan adanya dewan direksi, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional. Ukuran KAP sebagai proksi dari kualitas auditor juga diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen laba karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap merupakan gambaran yang paling penting (Sanjaya 2008).

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria: (1) Perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (*owner-manager*) dan (2) Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan bukan pemilik (*non ownersmanager*). Dua kriteria ini akan

mempengaruhi manajemen laba., sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola (Boediono,2005).

Teori keagenan (*agency theory*) memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik antara pemilik yaitu pemegang saham dengan para manajer. Konflik tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Jensen dan Meckling (1967) dalam Laila (2011), menyatakan bahwa: ...kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor.

Banyak hal yang memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Menurut Scott (2000) dalam Nugraha (2010), salah satu motivasi terjadinya manajemen laba yaitu bonus *purpose*, manajer termotivasi mengelola laba untuk mencapai target kinerja dan kompensasi bonus dengan bertindak secara oportunistik.

Ross et al (1999) dalam Restu Agusti (2009), menyatakan bahwa:

“Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya sendiri. Semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya manajemen laba”.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai kepemilikan manajerial dengan manajemen laba. Menurut Robert Jao (2011), kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba dan menurut Kusumawardhani (2012), kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Pemegang saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti perbankan, asuransi, dana pensiun dan reksadana. Investor institusional memiliki kapabilitas untuk menganalisis laporan keuangan secara langsung dibandingkan investor individual.

Midiastuty dan Machfoedz (2003) dalam Kusumawardhani (2012), juga menemukan bahwa:

“Kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba. Jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunistik maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi pengelolaan laba”.

Menurut Kusumawardhani (2012), bahwa:

“Semakin besar kepemilikan institusional pada perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan manajer melakukan aktivitas manajemen laba karena adanya fungsi pengawasan yang lebih baik dari investor yang *shopiscated* (berpengalaman)”.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai kepemilikan institusional dengan manajemen laba. Menurut Kusumawardhani (2012), kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan menurut Widyastuti (2007), struktur kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba baik secara parsial maupun simultan.

2.2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite ini merupakan komisaris independen sekaligus ketua komite. Anggota lainnya yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Komite audit memegang peranan penting dalam mendampingi dewan komisaris dalam menjalankan tugas serta mengawasi pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko serta fungsi audit internal dan eksternal. Komite audit berfungsi sebagai penghubung antara pihak eksternal auditor dengan pihak internal auditor, termasuk menampung segala masalah yang menyangkut bidang akuntansi, pengawasan internal, dan bidang auditing. Komite audit juga berfungsi sebagai mediator dalam berkomunikasi antara dewan direksi, akuntan publik dan internal auditor (Ikatan Komite Audit Indonesia dalam Pujiningsih, 2011).

Murhadi (2009), Perusahaan yang memiliki komite audit akan menghambat perilaku *earnings management* oleh pihak manajemen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat menemukan sejak dini praktik-praktik yang bertentangan dengan asas keterbukaan informasi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik *earning management*.

Penelitian Klein (2000) mengenai komite audit memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresional yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Carcello *et al.* (2006) menyelidiki hubungan antara keahlian komite audit di bidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit independen di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba.

2.2.4 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada

dewan komisaris (NCCG, 2001). Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*.

Menurut Achmad Afinan (2014) dalam Nuriyatun Fauziah (2014), semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laba dapat diminimalisir dan manajemen laba dapat dihindari. Terkait dengan manajemen laba, komisaris independen tidak berkaitan langsung dengan perusahaan yang mereka tangani, karena mereka bertugas untuk mengawasi direksi perusahaan tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.

Menurut Muhammad Dzulfikar (2015) dalam Vidya Fariza (2010) pentingnya dewan komisaris independen adalah untuk mengurangi tindakan manajemen dalam melakukan manajemen laba. Semakin banyak komisaris independen, maka pengawasan terhadap kebijakan manajemen juga akan bertambah banyak, dan manajemen akan lebih memperlihatkan kepentingan perusahaan daripada kepentingannya sendiri, sehingga manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen juga akan berkurang.

Menurut Vafeas (2000) dalam Bimo Bayu Aji (2012), peranan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat

manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Dengan banyaknya jumlah dewan komisaris yang ada, maka diharapkan dapat meningkatkan *corporate governance* sehingga manajemen laba juga diharapkan akan menjadi semakin menurun.

Menurut Xie et. Al (2003) dalam Vidya Fariza (2010), dewan komisaris independen dengan latar belakang bidang keuangan akan mencegah manajemen laba.

Menurut Pensnell et. Al (1998) dalam Vidya Fariza (2010), keberadaan dewan komisaris independen membatasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Hal ini sesuai dengan penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007); Veronica dan Utama (2005); Welfin I Guna dan Arleen Herawaty (2010) terbukti bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba namun bertentangan dengan penelitian Nastution dan Setiawan (2007), Pratama dan Mas'ud (2003) Cornett (dalam Ujiantho dan Pramuka, 2007) bahwa dewan komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.

2.2.5 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Manajemen Laba

Manajemen perusahaan sebagai agen memerlukan jasa pihak ketiga agar tingkat kepercayaan pihak eksternal perusahaan (salah satunya *principal*) terhadap pertanggungjawabannya semakin tinggi, begitu pula sebaliknya pihak eksternal perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk meyakinkan dirinya bahwa laporan

yang disajikan manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Akuntan publik sebagai auditor eksternal yang relatif lebih independen dari manajemen dibandingkan auditor internal, sejauh ini diharapkan dapat meminimalkan kasus rekayasa laba dan meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan (Palestin, 2008).

Auditor Big Four adalah auditor yang memiliki keahlian dan memiliki reputasi yang tinggi dibanding auditor Non Big Four. Jika auditor ini tidak dapat mempertahankan reputasinya, maka masyarakat tidak akan memberi kepercayaan kepada auditor Big Four sehingga auditor ini akan tiada dengan sendirinya. Ini terjadi pada KAP Arthur Andersen yang terlibat dalam kasus Enron (Sanjaya, 2008).

Meutia (2004) yang meneliti tentang hubungan antara kualitas auditor dengan manajemen laba menemukan bahwa semakin tinggi kualitas auditor maka semakin rendah manajemen laba yang terjadi di perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan Sanjaya (2008) yang menyatakan bahwa KAP Big Four yang memiliki kualitas auditor yang tinggi di mata masyarakat dapat mencegah manajemen laba.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan kualitas auditor yang tinggi yang dalam penelitian ini auditor yang termasuk Big Four akan mengurangi praktik manajemen laba.

2.2 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:93) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan model kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₃: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

H₄: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₅: Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.